

**KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA APARAT PENEGAK HUKUM
DALAM MENANGANI MASALAH PENAHANAN MENURUT KUHP
(STUDY KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SELONG)**



SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S1
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

Oleh:

HERU ADRIAN

NPM : 1228/0472/FH/01

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2005**

**KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM
MENANGANI MASALAH PENAHANAN MENURUT KUHAP
(STUDY KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SELONG)**

Skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

O

L

E

H

HERU ADRIAN

NPM : 1228/0472/FH/01

PEMBIMBING UTAMA



LALU SAPRUDIN, SH, MH

PEMBIMBING PEMBANTU



HUJAIR FAIZAN, SH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

2005

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi aparat penegak hukum dalam menangani masalah penahanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur dengan baik dan lancar, hal ini dapat dilihat :

1. Adanya kerja sama antara aparat penegak hukum yang melakukan penahanan dengan petugas Rutan, terutama dalam hal pemberitahuan petugas Rutan kepada aparat penegak hukum yang melakukan penahanan mengenai penahanan yang akan berakhir.
2. Permintaan perpanjangan masa penahanan oleh penyidik pada penuntut umum demi kepentingan penyidikan yang belum selesai, belum pernah mengalami kesulitan. Demikian pula permintaan perpanjangan masa penahanan oleh jaksa penuntut umum dan Hakim Pengadilan Negeri pada Ketua Pengadilan Negeri Selong.
3. Pengalihan tanggung jawab atas penahanan dari penyidik ke jaksa penuntut umum, dan dari jaksa penuntut umum ke hakim pengadilan negeri belum pernah mengalami kevakuman tanggung jawab atas penahanan, sehingga merugikan tersangka atau terdakwa atas pengurangan masa tahanan apabila ia terbukti telah

melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

4. Adanya mekanisme kontrol penahanan dari masing – masing aparat penegak hukum dan keluarga tersangka atau terdakwa ataupun penasehat hukumnya, sehingga mengurangi tindakan sewenang – wenang dari aparat penegak hukum yang melakukan penahanan, juga menghindari adanya tuntutan ganti kerugian.

B. Saran – saran

Kerja sama antara aparat penegak hukum yang selama ini berjalan dengan baik dan lancar perlu terus ditingkatkan agar terjamin adanya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum guna menyongsong pembaharuan hukum pidana nasional. Oleh karena kerja sama antara aparat penegak hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam menangani masalah penahanan, karena dengan kerja sama yang dilandasi semangat dan saling pengertian, proses penegak hukum akan mencapai hasil yang diharapkan. Kerja sama antar aparat penegak hukum sangatlah diperlukan dalam menangani masalah penahanan, sehingga tersangka atau terdakwa tidak dirugikan dalam pengurangan masa tahanan apabila nanti menjalani putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.